

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita nasional yang harus terus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional, masa depan dan keunggulan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya, disamping sumber daya alam dan modal. SDM yang berkualitas tinggi diharapkan secara signifikan dapat menjadi subjek pembangunan untuk lebih berhasil mengelola sumber daya (*resources*) bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pencerdasan bangsa merupakan upaya pengejawantahan salah satu cita-cita nasional, dan ini dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Lembaga pendidikan harus menempatkan dirinya sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam pemberdayaan SDM bangsa Indonesia. Karena itu kualitas pendidikan nasional perlu ditingkatkan dan dilaksanakan sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional.

Pendidikan dapat dianggap sebagai proses yang dinamis dalam usaha mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan peranannya di masa yang akan datang dengan berbagai karakteristik yang terkandung didalamnya, sebagaimana tercantum di dalam fungsi dan tujuan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada tahun 2020 negara Indonesia akan memasuki perdagangan bebas di kawasan Asia Pasific. Pada Tahun 2003, Indonesia memasuki pasar bebas pada kawasan ASEAN, serta pada tahun 2010 negara-negara maju telah mendahului akan memasuki perdagangan bebas di kawasan Asia Pasific (Soedjiarto 1995:1). Dalam momentum besarnya tantangan terhadap masa depan dalam percaturan era global ini baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya, kualitas SDM bangsa kita dipertaruhkan kompetensinya. Dalam bidang ekonomi saat ini kita sedang memasuki era perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dan tahun 2020 kita akan memasuki era perdagangan bebas Asia Pasific (APEC). Kedua momentum perdagangan bebas tersebut memunculkan persaingan mutu produk, jasa, dan pelayanan. Sudah barang tentu bangsa kita memerlukan SDM yang andal dan profesional sebagai pelaku (subjek) dalam dinamika dan hubungan ekonomi antar negara serta transformasi budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Namun pada kenyataannya dewasa ini, pendidikan nasional tengah menghadapi berbagai isu krusial. Isu berkisar masalah otonomi pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, desentralisasi dan debirokratisasi.

Otonomi pendidikan merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas dan wewenang daerah yang menuntut kesiapan SDM, restrukturisasi, rencana strategi, program dan sumber daya lainnya. Untuk mencapai kemandirian sebagaimana tujuan otonomi, maka diperlukan usaha-usaha pemberdayaan (*empowerment*) terhadap unsur-unsur masyarakat dan infrastrukturnya di daerah agar sekolah sebagai institusi sosial dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

Kini manusia Indonesia khususnya generasi muda penerus bangsa, dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan global, maka penerapan nilai-nilai dan norma universal yang diakui masyarakat global dan komprehensif namun terintegrasi dalam Standar Kompetensi Nasional, merupakan salah satu prasyarat untuk *survive* dalam dunia persaingan global yang semakin ketat. Ketika persaingan dalam aneka perspektif sosial, ekonomi, teknologi, dan kemampuan semakin bereskalasi secara masif, persyaratan kemampuan yang diperlukan orang untuk melakukan aneka pekerjaan semakin meningkat. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh di bangku sekolah seringkali tidak memadai lagi karena tuntutan profesionalisme dan kompetensi kerja yang bereskalasi tinggi, sementara menu sajian di sekolah teramat lambat pemutakhirannya. Lingkup pengetahuan dan keterampilan yang dapat diberikan oleh guru pun terbatas oleh kalender kerja dan kalender pendidikan, di samping kemampuan guru yang tidak tanpa batas.

Sorotan masyarakat pemakai lulusan dalam hal ini Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang paling tajam sering diarahkan pada lulusan-lulusan SMK, mereka diindikasikan kurang mampu menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana dijelaskan menurut Balitbang Depdiknas (1999:3) bahwa "Tamatan SMK dikritik karena tidak luwes menyesuaikan diri terhadap perubahan di tempat kerja, hanya memiliki keterampilan tunggal/spesifik yang cepat usang, tidak mudah dilatih ulang, mobilitas karier lamban, tidak mampu mengembangkan dirinya" dan banyak lagi kritik lainnya.

Kendati pun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu, seperti penyelenggaraan penataran-penataran untuk para tenaga pengajar, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar negeri, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, penyelenggaraan seminar-seminar dan sebagainya. Namun masalah rendahnya mutu pendidikan tersebut belum kunjung terpecahkan. Walaupun di hampir setiap pergantian personal penentu kebijakan pendidikan selalu membawa misi khusus yakni penyempurnaan kurikulum pendidikan. Perbaikan untuk menghasilkan kurikulum SMK yang diperbarui (edisi 1999) antara lain menurut Kepmendikbud No.080/1993 tanggal 27 Februari 1993 yang secara garis besar meliputi :

1. Penyempurnaan kurikulum dari program pendidikan berbasis sempit (*narrow-based curriculum*) menjadi berbasis luas, mendasar, dan kuat (*broad-based curriculum/BBC*).
2. Penyempurnaan GBPP dari orientasi pengajaran mata pelajaran menjadi orientasi pengajaran paket-paket kompetensi GBPP Kejuruan tidak disajikan lagi dalam bentuk uraian mata pelajaran, tetapi dalam bentuk peta kompetensi dan setiap kompetensi yang dilengkapi dengan paket (modul) pengajaran kompetensi.
3. Penyempurnaan metodologi pengajaran dari metode maju berkelanjutan (tanpa mengindahkan ketuntasan target mutu yang harus dicapai) ke metode pengajaran tuntas (*mastery Learning*). Siswa tidak diperkenankan

untuk maju pada paket kompetensi berikutnya sebelum paket yang dipelajari telah dikuasai secara tuntas.

4. Penguatan kemampuan adaptif dengan peningkatan mutu dan pembentukan keunggulan sebagai bekal menghadapi persaingan dalam era global, sekaligus merupakan bekal dasar bagi siswa untuk mengikuti perkembangan IPTEK yang cenderung makin cepat, dan memberikan pengayaan terhadap mata pelajaran dalam kelompok program adaptif.

Jadi intinya Keputusan Mendikbud tersebut berisi tentang landasan, program dan pengembangan kurikulum SMK. Pada landasan tersebut secara tegas bahwa perbaikan kurikulum SMK yang disebut dengan Kurikulum berbasis kompetensi ini dirancang dan disusun secara dinamis dan fleksibel, agar mampu mengantisipasi dan sekaligus mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi dengan membekali kemampuan daya suai dan pengembangan diutamakan lebih berorientasi kepada kebutuhan pemakai tamatan (*demand-driven*).

Untuk mempersiapkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi dan kebutuhan pasar kerja diperlukan peningkatan kompetensi lulusan. Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi yang meliputi *competency based training, life skills, akademik (scientific), broad based curriculum* dan *production based training* dilengkapi dengan keterpaduan implementasi pada dunia kerja merupakan racikan berkomposisi sepadan dengan tuntutan industri dalam era global. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan perlu terus dilakukan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Hal ini mengingat bahwa permasalahan pendidikan sejak dulu dirasakan masih belum kunjung terpecahkan.

Pada saat ini telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan mutu tamatan SMK yaitu Sri Hardjoko (1994:87) dalam studinya mengemukakan bahwa tamatan SMK masih jauh dibawah standar, dalam penelitiannya

mengemukakan dua faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu SMK kekurangan guru yang berpengalaman industri, dan kedua sumber daya fisik misalnya mesin-mesin bisnis. Alat-alat praktek dan bahan serta kekurangan dana operasional untuk penyelenggaraan praktik yang efektif dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia belum benar-benar mengarah kepada kondisi yang diharapkan.

Edward Sallis (1984:56) dalam *Total Quality Management in Education* menyebutkan, bahwa kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen) tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya dan pengembangan staf. Bahwa peran signifikan pendidikan dapat dilihat pada dunia bisnis khususnya dunia industri. Lembaga pendidikan adalah pemasok tenaga kerja dan dunia kerja atau industri sebagai pelanggan”.

Memasuki era perdagangan bebas terlebih jika memasuki jaringan dunia maya/internet (*World Wide Web*), dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini dan yang akan datang sudah tidak dapat mengelak lagi untuk mengisi halaman-halaman cybernet tersebut agar masuk dalam pasar global. Namun untuk mengarah ke dunia cybernetic itu pun di lihat dari segi SDM masih belum memadai, demikian pula dalam menghadapi tantangan lain yang semakin kompleks, yaitu masalah pengangguran. Untuk itu pengangguran merupakan faktor yang melatar belakangi lahirnya kebijakan program pendidikan berbasis kompetensi.

Angka pengangguran di Indonesia bukannya semakin berkurang, tetapi setiap hari jumlahnya semakin bertambah dan bahkan semakin meledak. Hal ini merupakan ancaman atau bahaya yang sangat serius untuk segera ditanggulangi, serta harus diupayakan solusinya.

Masalah pengangguran ini tidak bisa dilihat dengan sebelah mata, karena sebuah negara di mana pun di dunia ini, ledakan pengangguran merupakan ancaman yang menakutkan. Sebab hal ini akan dengan sendirinya menimbulkan segudang permasalahan sosial yang ruwet. Dan ini harus ditangani secara ekstra serius, karena angka pengangguran di negeri ini sudah sangat mengerikan menurut Perkiraan Pusat Studi Tenaga Kerja dan Pembangunan, angka pengangguran tahun 2001 jumlahnya 40,2 juta orang, artinya sekitar 20% dari jumlah penduduk. Jumlah itu terus meningkat, tahun 2002 jumlah tenaga kerja yang produktif tapi disia-siakan itu ditaksir sudah mencapai 42 juta. Dari penganggur sebanyak itu 1,91 juta adalah lulusan universitas. Tahun 2004 pengangguran di Indonesia diperkirakan akan berjumlah 45,2 juta orang. Yang 2,56 juta di antaranya adalah pengangguran kerah putih. Pengangguran terpelajar ini jumlahnya akan terus meningkat karena akan lebih banyak lagi pelajar dan mahasiswa yang *drop out*.

Selanjutnya, Ketua Kadin Bidang Telematika, Pos dan Media, Sharif Cicip Sutardjo, mengungkapkan bahwa: "Angka pengangguran di Indonesia tahun ini diperkirakan bakal meningkat. Menurut Perkiraan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, jumlahnya mencapai 50 juta orang". Disebabkan oleh ledakan pengangguran, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), meluncurkan program BBE dan Life Skills, dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kebijakan ini untuk Pendidikan Kejuruan (SMK) merupakan upaya penataan kembali konsep, perencanaan dan implementasi kejuruan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia



yang mengacu kepada kecenderungan (*trend*) kebutuhan pasar kerja baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun internasional.

Sesuai dengan permasalahan tersebut, beberapa pernyataan diantaranya sebagai berikut :

1. Mendiknas Abdul Malik Fadjar menyatakan: "Sekarang ini sekolah harus memberikan harapan pada peserta didik untuk bisa hidup mandiri, tanpa harapan itu, peserta didik akan memiliki dorongan yang kuat untuk mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah. Apalagi jika peserta didik datang dari kelompok masyarakat yang secara finansial kurang. Kalau tidak memiliki keahlian untuk hidup, maka setelah menamatkan pendidikan di tingkat lanjutan atas mereka hanya akan menambah jumlah pengangguran."
2. Dr. Ir. Gatot Priowirjanto, Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan Ditjen-Dikdasmen-Depdiknas dan Drs, Joko Sutrisno MM, Indonesia *Representative Seameo Vocational Technology* di Brunei Darussalam menyatakan: "khususnya mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia yang jumlah penganggur terdidik maupun non terdidik makin besar, membuat Depdiknas mengantisipasi dengan melakukan terobosan lewat program *Life Skill*. Pemerintah mencoba merubah pendidikan dan pengajaran yang sekitar 30 tahun ini hanya mementingkan materi pokok pelajaran, menjadi pendidikan secara menyeluruh. Sebuah pelajaran penting terjadi saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan besar melakukan rasionalisasi karyawan. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Banyak diantara mereka tanpa pengalaman mencoba melakukan usaha kecil dengan aneka resiko. Untuk ini, SMK dipandang perlu memberi bekal keterampilan *entrepreneurship* (kewiraswastaan) kepada muridnya agar suatu hari dapat mandiri".
3. Wapres RI Dr. H Hamzah sebagaimana di kutip dalam pernyataannya pada harian umum Kompas tertanggal 18 April 2002 yang isinya: bahwa kurikulum pendidikan nasional kita harus diubah total karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kurikulum harus mampu memberi nilai tambah, nilai ekonomis pada sumber daya alam negeri ini. Dengan demikian para siswa atau mahasiswa yang telah tamat bisa produktif dan tidak menganggur.
4. Prof. Dr. Nanang Fattah (Harian Umum Pikiran Rakyat, 11 Februari, halaman 3): "Kualitas sistem manajemen pendidikan di Indonesia ternyata menduduki peringkat terbawah di tingkat Asia. Peringkat teratas diduduki oleh Korea Selatan, disusul Singapura, Jepang, Malaysia. Mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang berada

di peringkat ke 109 (seratus sembilan) dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) negara”.

5. Wahyuni, Harian Umum Kompas (23 Desember 2001, halaman 18): “Berdasarkan indeks sumber daya manusia (*Human Development Index /HDI*) dari UNDP, di tahun 2000 ini peringkat SDM Indonesia berada di urutan 109 dari 174 negara, terendah di antara negara-negara di Asia peringkat Indonesia di tahun 2000 itu menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1988. Saat itu SDM Indonesia menduduki peringkat 96. Sementara Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura masing-masing berada pada peringkat 77, 67, 56, 25, dan 22 pada tahun 2000 itu. Ini artinya, Indonesia menjadi bangsa paling terpuruk di ASEAN saat memasuki AFTA 2003.”
6. Efektivitas pendidikan di Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagaimana menurut laporan The World Economic Forum 1997 menyebutkan daya saing yang masih rendah, peringkat ke 41 (empat puluh satu) dari 46 (empat puluh enam) negara. Sedangkan The World Competitiveness Report 1977 menggambarkan rendahnya daya saing SDM Indonesia dari segi kemampuan menembus pasar Internasional yaitu urutan ke 37 (tiga puluh tujuh) dari 45 (empat puluh Lima) negara di Asia, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi urutan ke 40 (empat puluh) serta persaingan SDM pada urutan ke 45 (empat puluh lima)”. (Tetet Cahyati, Harian Umum Pikiran Rakyat 22 Desember 2001, halaman 18).
7. Berdasarkan Laporan UNDP tahun 1998,, indeks pembangunan manusia (*Human Development Index/ HDI* yang diukur dari 174 negara, Indonesia menduduki peringkat ke 96, jika dibanding negara ASEAN lainnya seperti Singapura (26), Brunei (36), Thailand (59), Malaysia (60), maka prestasi yang dicapai Indonesia jauh tertinggal, apalagi jika dibandingkan dengan negara Jepang (8) dan Korea Selatan (30)”. (Harian Umum Pikiran Rakyat, 18 Februari 2000, halaman 6).
8. Laporan *The World Competiveness Report* (1996) sangat jelas menunjukkan dan membuktikan rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) kita, khususnya di lingkungan negara-negara di Asia. Dari segi menembus pasar internasional, Indonesia berada pada urutan ke 37, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kita berada pada urutan ke 40, dan persaingan SDM kita berada pada urutan terakhir ke 45. Singkatnya, kekuatan SDM dan IPTEK masih berada pada peringkat yang sangat rendah dibanding dengan negara-negara di Asia lainnya”. Sulya Darma, Wakil Ketua Sekretariat Majelis Penelitian Perguruan Tinggi-DITJEN Pendidikan Tinggi Depdikbud, Harian umum Republika, 22 Oktober 1997.
9. “Dari Komparasi Internasional, mutu pendidikan di Indonesia juga kurang menggembarakan, Human Development Index/HDI, Indonesia



menduduki peringkat ke 102 dari 106 negara yang di survei, satu peringkat di bawah Vietnam, Survei the Political Economic Risk Consultation (PERC) melaporkan Indonesia berada di peringkat ke 12 dari negara yang di survei, juga satu peringkat di bawah Vietnam (TIM-BBE Depdiknas, Konsep Buku 1 Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup/Life Skills, Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas/BBE, Jakarta, 2002 halaman 2).

10. Secara jujur perlu diakui menurut (Gatot Hari Prijanto, Dedi Supriadi 2001:604) diakui sampai dengan berakhimya abad ke-20, pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia belum benar-benar mengarah kepada kondisi yang di harapkan. Hal ini ditandai dengan: (1) struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja yang kurang terdidik, sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi (2) penyiapan tenaga kerja tingkat menengah seakan-akan hanya menjadi tugas dan dilakukan oleh SMK, sementara sebagian besar tamatan SMU atau yang sederajat tidak melanjutkan pendidikannya yang kemudian masuk ke pasar kerja (3) Tingkat pengangguran tamatan sekolah menengah sebesar 12% untuk tamatan SMK dan 18% untuk tamatan SMU (SUPAS,1995) (4) penguasaan kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja Indonesia masih rendah di dibandingkan dengan tenaga kerja negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Semua ini menyebabkan tenaga kerja Indonesia sulit bersaing bahkan tidak sedikit peluang pekerjaan yang ada di Indonesia sendiri diambil oleh para pekerja asing. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, maka peningkatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam pembangunan.

Lulusan bermutu merupakan SDM yang kita harapkan bersumber dari sekolah yang bermutu (efektif) sudah siapkah sistem pendidikan kita untuk menetasakan mutu SDM yang mampu berkompetisi secara profesional dengan bangsa-bangsa lain? Untuk melangkah kearah sekolah bermutu, maka menurut (Syafarudin 2002:16) adalah (1) Perbaiki manajemen pendidikan sekolah (2) persediaan tenaga kependidikan yang profesional (3) perubahan budaya sekolah (visi, misi, tujuan dan nilai) (4) peningkatan pembiayaan pendidikan, dan (5) pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.

Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, mengangkat derajat dan harkat bangsa. Untuk itu

sistem pendidikan memerlukan manajemen modern yang ditangani oleh tenaga-tenaga profesional yang bertumpu pada mutu yang diharapkan oleh pelanggan pendidikan. Pengembangan SDM di sekolah untuk kepentingan bangsa di masa depan adalah peningkatan kontribusi manajemen pendidikan yang berorientasi mutu (*Quality Oriented*). Mutu pendidikan adalah satu faktor kunci dalam kompetisi antar negara di era globalisasi ini. Mutu produk dan pelayanan yang dihasilkan berbagai lembaga pendidikan ditentukan oleh kompetensi manajerial, kepemimpinan, visi dan integritas kepribadian para manajer, guru-guru, dan pegawai dalam mengelola pendidikan. Pendidikan di abad ke-21 diprediksi akan jauh berbeda dari pendidikan yang sekarang. Dijelaskan oleh Sindunata dalam bukunya *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (2000:95)* sebagai berikut "UNESCO mulai tahun 1997, mulai menggali kembali dan memperkenalkan The Four Pillars Of Education, yaitu :

- (1) ***Learning To Know*** (Belajar Untuk mengetahui) menurut Dr. Victor Ordonez (Direktur UNESCO) *Learning To Know* berbicara tentang tiga hal yaitu Materi Pembelajaran, Proses Pembelajaran dan Si Pembelajar. Materi Pembelajaran bukan sekedar informasi tetapi budaya yang hidup (*Living Culture*), dan tradisi Etika. Materi ditentukan oleh Lembaga Pendidikan berdasarkan kebutuhan pembelajar untuk dapat belajar sepanjang hayat. Proses Pembelajaran akan mengikuti paradigma baru dan Si Pembelajar berusaha untuk memahami logika berfikir pembelajar dan berusaha memasuki dunia anak muda, serta menyikapi materi pembelajaran dengan benar sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang.
- (2) ***Learning to Do*** yaitu belajar untuk dapat menerapkannya. Dr. Murther W Al-Masri (Presiden dari *National Center For Human Recources Development*) menyatakan bahwa *Learning To Do* lebih banyak terkait dengan Vokasional dan Pasar kerja. Yang mendasari kegiatannya adalah lebih memperhatikan Kompetensi personal yang menggabungkan ketrampilan dan bakat seperti perilaku sosial, prakarsa personal dan kehendak untuk mengambil resiko "Kompetensi personal siswa" mempunyai ketrampilan dasar (Membaca. Menulis, berbicara, mendengarkan, berhitung), Ketrampilan berfikir (kemampuan berfikir kreatif, mengambil keputusan, penyelesaian permasalahan, memvisualisasikan belajar dan menggunakan nafar), dan beberapa kualitas kepribadian (*Self-Esteem*, tanggung jawab, kemampuan bersosialisasi, *self-management*, integritas, kejujuran).

- (3) **Learning To Live Together** (Pembelajaran nilai-nilai kehidupan kebersamaan). Learning To Live Together diperlukan dalam globalisasi yang kooperatif tetapi juga pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan sehingga ada usaha bersama untuk saling mengasihi dalam kehidupan bersama.
- (4) **Learning to Be** merupakan pilar pendidikan ke empat, konsep dari Learning To Be adalah bahwa tujuan pendidikan sebagai akibat dari perubahan yang cepat dalam ilmu pengetahuan, kebutuhan akan pengembangan dalam masyarakat serta aspirasi akan kebutuhan pemahaman internasional dan perdamaian, dalam pengembangan manusia adalah tercapainya perkembangan yang semaksimal dan seutuhnya dalam kepribadian, seluruh bentuk ekspresi dan komitmennya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, jadi dalam hal ini kaitannya dengan Pendidikan sepanjang hayat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas, Diknas pada tahun 1999 menawarkan paradigma baru yaitu "Otonomi yang memberi fleksibilitas kepada sekolah tetapi sekaligus menuntut Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban Pimpinan sekolah, guru terhadap stakeholder/ Pemerintah, masyarakat dan pasar kerja dan di evaluasi melalui akreditasi serta self-evaluation untuk mencapai kualitas yang berkesinambungan. Perubahan paradigma baru pendidikan khusus untuk SMK adalah dengan reposisi kejuruan yaitu melalui **Broad Based Curriculum (BBC); Competency Based Curriculum (CBC) dan Competency Based Training (CBT)** dan yang disebut terakhir merupakan salah satu pendekatan strategi untuk peserta diklat/siswa SMK mencapai Standar Kompetensi dalam Bidang Program Keahlian Penjualan. Manajemen sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi ; berbicara tentang bagaimana manage sistem pendidikan jenis SMK dengan pola standar kompetensi melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di dua tempat yaitu di sekolah sendiri sebagai induk institusi dan di Dunia Usaha atau dunia Industri sebagai work place. (lihat gambar 1.1. berikut ini) :

Gambar 1.1 di atas memperlihatkan sebuah bagaimana mengelola sistem pendidikan SMK dengan berbagai factor yang mempengaruhinya yaitu mulai dari input dimana calon siswa diseleksi untuk dapat menjadi siswa SMK, input dari hasil seleksi adalah siswa dengan kondisi normal yaitu yang memiliki kematangan mental dan fisik, kemampuan intelektual dan psikomotorik, memiliki karakteristik afektif, minat, motif, sikap nilai-nilai ekspresi emosional, kebiasaan belajar, konsep aku. Dengan misi, visi dan tujuan SMK maka raw input berupa siswa lulusan SMP/Mts diproses dengan berbagai instrumental input seperti: Kepala Sekolah, Guru, Kurikulum Fasilitas Pendidikan yang ada di Intern Sekolah ditambah dengan partisipasi unsur terkait seperti adanya organisasi profesi/dunia usaha dan industri serta partisipasi masyarakat/orang tua melalui Komite Sekolah. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem modularisasi, Standar kompetensi yang dijadikan acuan bagi pembelajaran telah disusun oleh tim yang terdiri dari unsur pendidikan dan unsur organisasi profesi. Oleh karena itu Uji kompetensi dilaksanakan harus melibatkan dua unsur tim pmguji (Assessor) yaitu dari intern (SMK) dan dari ekstern (DU/DI). Output yang diharapkan adalah lulusan yang kompeten dengan pengakuan sertifikasi kompetensi yang disahkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam konteks inovasi pendidikan di era otonomi pendidikan restrukturisasi adalah hal yang mendesak. Salah satunya adalah restrukturisasi Manajemen Pendidikan (Sekolah). Peranan Manajemen Pendidikan sangat signifikan untuk menciptakan sekolah-sekolah bermutu. Menurut Reigeluth dan Garfinkle (1994:245) kebutuhan terhadap paradigma baru pendidikan di

dasarkan atas perubahan besar-besaran dalam kondisi dan kebutuhan-kebutuhan pendidikan dalam masyarakat informasi.

Organisasi sekolah adalah suatu sistem. Salisburry (1996:198) berpendapat bahwa sistem adalah suatu kumpulan bagian atau komponen-komponen yang bekerjasama sebagai satu kesatuan fungsi. Satu komponen dengan komponen yang lain saling bekerjasama dalam mencapai tujuan sistem. Sistem sekolah terdiri dari gedung, tujuan, manajemen, kurikulum, fasilitas, pekarangan, guru, dan murid. Komponen sistem pendidikan satu sama lain saling berkaitan dalam pola kerja dengan mengikuti prosedur sistem input, proses dan output serta evaluasi, dimana seluruh komponen tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Pendidikan.

Hal ini berarti bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mencapai tujuan dengan melahirkan lulusan yang berkualitas sesuai harapan pelanggan atau masyarakat.

Produk pendidikan dikatakan bermutu, menurut Depdikbud (1993:4) jika mempunyai ciri-ciri (sebagian atau seluruhnya) sebagai berikut: (1) menunjukkan penguasaan terhadap tugas-tugas belajar "*learning task*" yang sesuai dengan tujuan pendidikan (2) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya atau dapat melakukan sesuatu yang fungsional untuk kehidupannya (3) relevan dengan tuntutan lingkungan atau dunia kerja.

Soedjiarto (1996:8) menyatakan bahwa untuk menyiapkan lulusan yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sehingga siap kerja, lembaga pendidikan kejuruan sering terbentur oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurang tersedianya pendidik praktik yang berpengalaman dalam proses industri (2)

mahalnya peralatan praktik yang memenuhi syarat seperti yang seharusnya terdapat dalam praktik di industri yang sebenarnya, dan (3) sukarnya diciptakan suasana kerja praktik yang benar-benar mewakili keadaan nyata di dunia industri.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan merupakan sekolah bermutu yang mampu untuk menetasakan lulusan bermutu sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sanggup berkompetisi secara profesional dengan bangsa lain.

Pendidikan Kejuruan telah menjadi bagian terpadu dari Sistem Pendidikan di berbagai negara. Suharsimi Arikunto (1990:6) mengemukakan bahwa: "*Vocational education emphasis on job preparation or advancement in employment*", *learning achivement* seperti yang dikaitkan dengan kurikulum dan standarisasi saja, tetapi mutu harus di lihat dari relevansi apa yang diajarkan dengan apa yang dipelajari, dan sejauh mana apa yang diajarkan dengan yang dipelajari tersebut sesuai dengan *learning needs* saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan mengingat standar kriteria mutu sangat multi kriteria terhadap mutu pendidikan tersebut, maka untuk mencapainya diperlukan adanya kesepahaman mengenai bagaimana Standar Kompetensi yang diaplikasikan di SMK.

Untuk itu masalah penelitian ini dapat diidentifikasi secara umum sebagai berikut :

1. Apakah kriteria standarisasi untuk bidang keahlian penjualan sudah sesuai dalam proses pembelajaran sehingga menjamin lulusan SMK Program

Keahlian Penjualan akan sanggup bekerja sebagai Tenaga profesional dalam bidang keahlian penjualan ?

2. Apakah pelaksanaan CBT sudah mengacu pada proses pembelajaran bidang Keahlian Penjualan yang sudah distandarisasikan oleh Dunia Usaha/Dunia Industri ?
3. Apakah Kompetensi yang dimiliki oleh seorang Guru SMK (abilitas guru) untuk bidang keahlian penjualan sudah memadai ?.
4. Apakah Performance Kepala Sekolah sudah membawa siswa program keahlian penjualan kearah akuntabilitas kepada pemerintah, masyarakat dan pasar kerja dalam bentuk kompetensi Bidang Penjualan ?
5. Apakah kelengkapan fasilitas/sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pembentukan kompetensi siswa untuk bidang keahlian penjualan sebagai pendukung di dalam proses belajar mengajar sudah terpenuhi ?.

Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan permasalahannya berkisar pada Pendidikan Berbasis Kompetensi dengan fokus studi bahwa faktor siswa sebagai peserta didik yang dituntut untuk menguasai kompetensi dipengaruhi oleh faktor-faktor dominan yang terdiri dari faktor guru selaku fasilitator harus sanggup menghantarkan siswanya ke arah penguasaan kompetensi, faktor sarana/fasilitas pendidikan merupakan bagian penting baik berupa alat, bahan atau tempat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelaksanaan diklat berbasis kompetensi dan faktor Kepala Sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah harus memiliki performance yang proaktif terhadap kelancaran proses pelatihan berbasis kompetensi.

1.3 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian. Istilah tersebut dituangkan pula dalam rumusan masalah yang masih perlu diberikan pengertian secara operasional. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memaknai beberapa konsep yang dipergunakan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa konsep mendasar untuk memudahkan pemahaman terhadap ungkapan-ungkapan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Manajemen;** Proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di SMK Negeri Bidang Program Keahlian Penjualan dengan segala aspeknya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.
- 2) **Sistem Pendidikan;** adalah sekelompok atau seperangkat obyek/bagian/komponen dalam hal ini adalah fasilitas/sarana dan prasarana pendidikan (*hardware*), program-program dan acuan standar kompetensi (*software*) termasuk SDM seperti Kepala sekolah, Guru dan tenaga administrasi yang interdependen dan interconnected satu sama lain (*brainware*), yang dapat menyelesaikan seperangkat obyektif (tujuan) yang telah ditetapkan lebih dahulu dalam hal ini terangkum dalam visi dan misi SMK itu sendiri.
- 3) **Kompetensi;** Kompetensi menurut H. H. Mc. Ashan (1981: 21) dalam Tarsisius Sihono (197: 69) mendefinisikan kompetensi sebagai

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperoleh seseorang, yang telah menjadi bagian dirinya di mana ia dapat melakukan dengan baik perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotor (*The knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactory perform particular cognitive, affective, and psychomotor behavior*). Sedangkan J.R.Crunkilton (1988:6) mengatakan bahwa kompetensi adalah tugas-tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang dianggap kritis untuk keberhasilan ketenagakerjaan. Jadi kompetensi yang di maksud dalam penelitian adalah pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam proses belajar mengajar. Sehingga ia mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kemampuan siswa dimaksudkan sebagai kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh siswa sebelum dan setelah mengikuti proses pembelajaran dalam mata diklat Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen melalui tes tertulis maupun tes perbuatan. Dalam hal penilaian hasil belajar yang berbentuk keterampilan, komponen dievaluasi meliputi persiapan kerja, proses kerja, dan sikap kerja.

- 4) **Standar Kompetensi;** adalah suatu potensi kepribadian penguasaan seperangkat kompetensi yang meliputi kompetensi ketrampilan proses dan penguasaan pengetahuan (akademik). Kedua unsur tersebut dikolaborasikan dalam bentuk satu kesatuan dan membentuk struktur kemampuan/dalam bentuk kerangka acuan yang harus dimiliki. Standar Kompetensi Nasional merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan

secara nasional dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua dan penentu kebijakan. Standar bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan hasil belajar peserta didik.

- 5) Pelatihan Berbasis Kompetensi;** yaitu suatu pendekatan pengajaran berdasarkan paket-paket program, setiap paket program mengacu pada pencapaian kompetensi tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan setiap kompetensi memakai acuan kriteria terukur. Secara spesifik pelatihan berbasis kompetensi adalah kemampuan untuk menginterpretasikan ilmu yang bersumber pada kajian-kajian ahli tentang bidang tertentu yang menitik beratkan pada penguasaan suatu pengetahuan, sikap dan keterampilan itu harus di implementasikan dengan standar industri yang ada, bukan standar relatif yang ditentukan oleh keberhasilan seseorang dalam suatu kelompok. Kriteria atau ukuran pencapaian kompetensi itu kemudian ditentukan secara eksplisit, dan proses pengajaran yang dilaksanakan dan dikonsentrasikan untuk membantu siswa mencapai kriteria tersebut sebagai indikasi penguasaan kompetensi. Implisit dalam disain pengajarannya, adalah konsep disain sistem, modularisasi kegiatan instruksional diarahkan untuk memungkinkan siswa belajar secara individual. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi ini menurut Weber dinyatakan sebagai berikut:

A Competency based teacher education program is a program in which the competencies to be demonstrated by the student and the criteria to be applied in assessing the competencies of the student are



made explicit and the student is held accountable for meeting criteria. (P3G, 1981)

Menurut pengertian ini proses pendidikan berawal dari dan berakhir pada seperangkat kompetensi tertentu. Sebagai titik pangkal, maka kurikulum sekolah disusun dengan berorientasi pada kompetensi (kemampuan) yang hendak dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Untuk itu, kurikulum berorientasi pada tugas-tugas yang diharapkan dari lulusan.

Dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Kompetensi di SMK Bidang keahlian Manajemen dan Bisnis khususnya pada Program Keahlian Penjualan bahwa Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) merupakan suatu pendekatan yang baru dan masih dalam taraf sosialisasi. Titik awalnya adalah Standar Kompetensi yang relevan bagi DU/DI.

6) Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Dalam implementasi di SMK pelatihan berbasis kompetensi ini, waktunya adalah berkala setiap minggu terjadwal (baik satu atau dua kali pertemuan per minggu) pada pelaksanaan praktik di laboratorium penjualan. Tempat bisa berubah menjadi di Institusi pasangan (perusahaan) yang telah melakukan kesepakatan sebelumnya, perubahan tempat praktek ini boleh terjadi karena peralatan pendukung yang harus ada berdasarkan tuntutan kurikulum ternyata belum tersedia di laboratorium sekolah. Misalnya minimarket milik sekolah (tempat praktek penjualan) belum memiliki mesin *cash register*, maka sekolah harus mengirimkan siswa ke perusahaan departemen store/supermarket yang telah menjadi partner SMK agar siswa

memperoleh kompetensi "mengoperasikan mesin bisnis cash register" langsung di dunia usaha.

- 7) SMK Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Penjualan;** adalah Sekolah Menengah Kejuruan yaitu Pendidikan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja khususnya program keahlian penjualan, serta sanggup mengembangkan sikap professional di bidnag kejuruannya. Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi tenaga produktif yang mampu menciptakan produk unggul dan dapat besaing di pasar bebas.
- 8) Penjualan adalah** sesuatu proses kegiatan penyerahan barang atau jasa berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait dalam kegiatan itu. Orang yang menyerahkan barang atau jasa, yaitu penjual (salesman), akan menerima sejumlah uang (sesuai harga) dari pembeli yang membeli barang atauu jasa untuk memenuhi keperluan sendiri, maupun untuk dijual kembali kepada pihak lain.

1.4. Perumusan Masalah

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik untuk skala lokal, nasional, regional maupun internasional. Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan sebagai pranata utama peningkatan SDM berkualitas menjadi sangat penting.

Berangkat dari identifikasi di atas, maka masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini berkenaan dengan :

1. Apakah Performance Kepala Sekolah itu berhasil dan efektif sesuai dengan visi, misi tujuan dan program yang ada ?
2. Kendala apakah yang dihadapi Kepala sekolah ketika mengimplementasikan pendidikan berbasis kompetensi?
3. Apakah karakteristik Diklat program keahlian Bidang penjualan disesuaikan dengan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi?
4. Apakah guru program Keahlian Bidang Penjualan mempunyai Abilitas mengajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis kompetensi?
5. Alat-alat apa yang tersedia yang membantu terhadap kelancaran dalam pelaksanaan terbentuknya kompetensi siswa program keahlian penjualan?
6. Apakah accelerated Learning dilaksanakan dalam pelaksanaan PBM di kelas dalam ruang terbentuknya kompetensi siswa program Keahlian Penjualan?
7. Apakah lulusan siswa itu mencapai criteria kompetensi sesuai dengan yang diharapkan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara cermat masalah-masalah yang berkaitan dengan Pengembangan Manajemen Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi di SMK Negeri se-Kota Bandung khususnya untuk Program Keahlian Penjualan. Secara lebih spesifik aspek-aspek informasi yanmetode diharapkan di peroleh, berkaitan dengan manajemen sistem pendidikan di SMK antara lain adalah semua tindakan diarahkan kepada pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) yang sudah ditetapkan. Performance Kepemimpinan Kepala Sekolah, Staf, Abilitas Guru-guru dan Fasilitas Pendidikan akan memberikan kerangka penyempurnaan dalam hal strategi perbaikan sekolah, seperti percepatan pembelajaran (*accelerated learning*), manajemen, pemberdayaan guru, pendidikan berbasis hasil sesuai dengan standar, efektivitas lembaga, pendidikan berbasis masyarakat dan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga dapat dihasilkan suatu kompetensi yang sesuai dengan harapan yang dapat memenangkan kompetisi di pasar global saat ini.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1.5.2.1 Manfaat Secara Umum

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bagi dunia pendidikan hasil penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia pendidikan di tengah-tengah semakin pesatnya dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sebuah bahan untuk kajian komparatif guna melihat dan membandingkan fenomena-fenomena pendidikan yang terjadi.
- b. Bagi Perguruan Tinggi (LPTK), hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini pula hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian guna mengembangkan model

pendekatan dalam pembelajaran yang lebih dinamis dan inovatif sesuai dengan peran yang diemban oleh Perguruan Tinggi/ LPTK.

- c. Bagi guru dan Kepala Sekolah sekaligus juga sebagai pelaku pendidikan yang ada di sekitar SMK, penelitian ini dapat menambah nuansa baru, khususnya dalam pelaksanaan pengajaran melalui pendekatan *CBT*, terutama keaktifan siswa serta penekanan pada bentuk pembelajaran yang diarahkan memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik.
- d. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dan informasi awal untuk ditindaklanjuti dalam berbagai bentuk penelitian dan pengembangan dalam ruang dan kajian yang lebih luas.
- e. Bagi siswa Program Keahlian Bidang Penjualan selaku peserta diklat penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai pengalaman, sekaligus menemukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesungguhnya diperlukan terutama disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

1.5.2.2 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian semacam ini bagi peneliti merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi bertambahnya wawasan dan menemukan teori-teori dasar atau suatu bentuk baru sebagai hasil pengembangan, terutama dalam kaitannya dengan manajemen pengembangan sistem pendidikan termasuk dalam ranah atau *boundary* disiplin ilmu Administrasi Pendidikan.

1.6. Kerangka Berpikir Penelitian

Kritik tajam yang dilontarkan oleh dunia usaha dan industri terhadap lulusan sekolah kejuruan yang katanya tidak siap kerja memicu lahirnya Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (*competency based training*), Istilah yang dikenal dengan CBT ini berorientasi pada kemampuan yang perlu dikuasai oleh peserta diklat sebagai tujuan pendidikan. Visi dan Misi SMK yang pada dasarnya berwawasan masa depan dengan upaya mempersiapkan SDM yang professional dan kompeten di bidangnya, membawa para praktisi pendidikan untuk lebih memperhatikan dan selalu berpijak pada dunia nyata yakni bagaimana pemberdayaan para siswa agar selalu dinantikan kelulusannya oleh dunia usaha dan dunia industri, dalam arti kompetensi mereka benar-benar dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu melalui pendekatan *Competency-based curriculum (CBC)*, *Broad-Based Curriculum (BBC)* dan *Competency-Based Training (CBT)*, maka komponen-komponen sistem pendidikan kejuruan ditingkat sekolah seperti Performance Kepala Sekolah sebagai *figure* pengendali manajemen sekolah, Ability guru yang dengan perannya dapat menghantarkan siswa menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya dan bagi bangsanya. Fasilitas sarana dan prasarana yang dapat memperlancar jalannya pendidikan dan pelatihan demi tercapainya kompetensi hanya dapat terpenuhi keberadaan dan kelengkapannya atas perhatian dari pihak komite sekolah dalam hubungannya secara interaktif dan proaktif dengan industri. Dengan strategi pelaksanaan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi diharapkan pencapaian kompetensi dapat lebih efektif dan efisien. Strategi tersebut antara lain :

1.6.1. Standar Kompetensi sebagai acuan baku yang ditetapkan bersama antara pihak DU/DI dan pihak pengembang kurikulum pendidikan. Para perumus Standar kompetensi berasumsi bahwa dengan strategi ini akan memperjelas arah dan pijakan praktisi pendidikan dalam membawa para siswanya untuk menjadi lulusan yang kompeten untuk menjadi tenaga ahli di bidangnya. Standar kompetensi untuk program keahlian penjualan adalah seperti juga dituangkan dalam bagan seperti berikut :

- Mengetik secara manual dan elektrik
- Mengoperasikan komputer
- Mengoperasikan alat-alat komunikasi kantor
- Mengoperasikan Mesin-mesin bisnis
- Melakukan pemasaran barang dan jasa
- Melakukan penjualan barang dan jasa

Dalam standar kompetensi untuk mengoperasikan peralatan dan mesin-mesin bisnis harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur ini biasanya dikeluarkan oleh pabrik pembuat alat tersebut atau perusahaan lain sebagai rekanan yang diberi hak dan wewenang untuk itu. Buku manual yang berkaitan dengan operasional mesin disebut *Standard Operational Procedure (SOP)*. Siswa akan dikatakan kompeten jika dalam menangani mesin tersebut sesuai dengan SOP.

1.6.2. Pengujian, adalah suatu sistem penilaian dengan perangkat yang disusun sedemikian rupa untuk mengetahui apakah kompetensi yang distandarkan telah dimiliki oleh siswa. Pengujian yang saat ini dinamakan "Uji Kompetensi" telah mulai disosialisasikan. Pengujian juga dilaksanakan

dengan terlebih dahulu mengajukan prosal berkaitan dengan kompetensi tertentu yang dipilih siswa untuk dijadikan kompetensi unggulannya atau yang paling dikuasainya. Setelah proposal disetujui oleh panitia uji kompetensi, maka dilanjutkan dengan penulisan Tugas Akhir disingkat "TA". TA bukan sekedar sebuah tulisan, namun sebagai bukti fisik dari penguasaan kompetensi yang dipilihnya. Uji kompetensi ini membutuhkan waktu lama hingga mencapai tiga bulan. Pada puncak pengujiannya para siswa melakukan presentasi dan demonstrasi dihadapan tim penguji (assessor) yang sengaja diundang dari asosiasi profesi atau dunia usaha dan industri. Merekalah yang berhak memberikan penilaian untuk layak tidaknya siswa tersebut memperoleh pengakuan kompeten.

1.6.3. Strategi dan Materi Belajar, strategi belajar melalui sistem modularisasi membuka kemungkinan untuk melakukan pembelajaran untuk waktu kapan dan tempat dimana saja, karena setiap modul dilengkapi dengan perangkat tugas berupa lembaran kerja dan lembaran evaluasi yang harus dikerjakan. Dengan beberapa arahan dan aturan yang harus ditaati dalam penggunaan atau pembelajaran modul ini seperti tidak diperbolehkannya mempelajari materi bagian ke dua sebelum bagian satu dikuasainya. Penguasaan setiap materi dikontrol dengan instrumen atau alat ukur yang akan diperiksa oleh pembimbing atau guru yang berfungsi sebagai fasilitator. Pemeriksaan ini tidak hanya berdasarkan bukti tertulis saja namun juga lisan dan pengamatan (observasi). Keputusan untuk boleh tidaknya beralih dari materi terdahulu ke materi

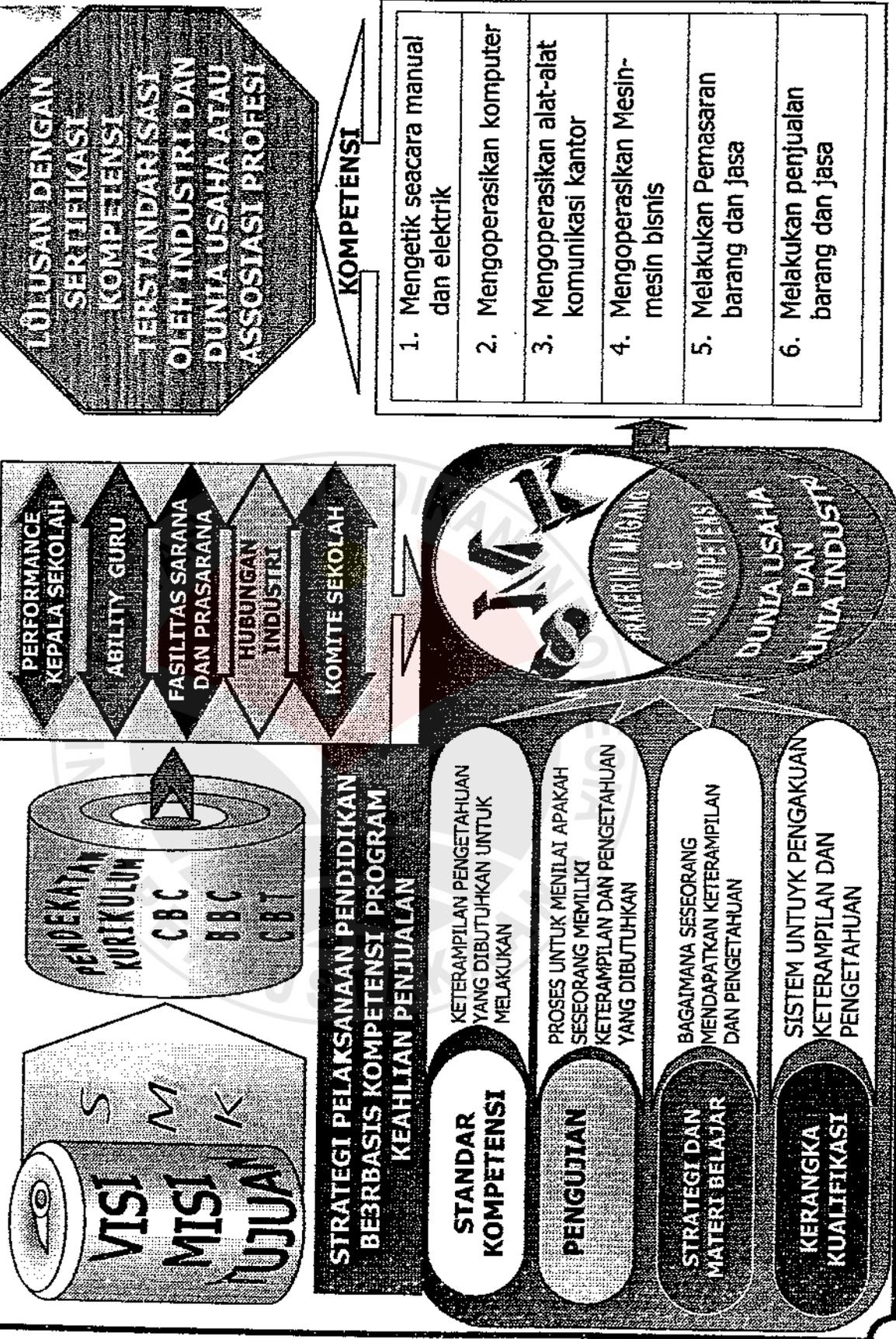
berikutnya bergantung kepada diri siswa itu sendiri. Model belajar seperti ini dinamakan "belajar tuntas" (mastery learning).

1.6.4. Kerangka Kualifikasi, adalah sistem untuk pengakuan dari asosiasi profesi atau dunia usaha dan industri terhadap seseorang siswa yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi dan kepadanya diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh pihak berwenang dari asosiasi profesi itu sendiri. Sertifikat kompetensi adalah bentuk fisik dari sebuah pengakuan terhadap seseorang yang telah menguasai kompetensi tertentu. Dengan sertifikat ini maka semua unit usaha yang memiliki kualifikasi dan link dengan asosiasi profesi akan mengakui kualifikasi profesi dari pemilik sertifikat tersebut.

Dengan empat buah strategi tersebut pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan di dua tempat yakni di sekolah dan atau di dunia usaha dan industri dalam bentuk praktek kerja industri (Prakerin), magang atau pada saat proses pembimbingan penulisan Tugas Akhir (TA) hingga proses pengujiannya.

Dalam upaya menghantarkan siswa menjadi manusia kompeten maka baik pihak sekolah maupun pihak dunia usaha dan industri atau institusi pasangan telah sama sama menyepakati bahwa terdapat sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Khusus untuk program keahlian penjualan, kompetensi tersebut diantaranya ada beberapa item seperti tertuang dalam bagan/gambar berikut ini :

Gambar 1.2
KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN





1.7. Asumsi Dasar Penelitian

- 1.7.1. Dunia Usaha dan Dunia Industri merupakan institusi pasangan bagi SMK khususnya untuk Program Keahlian Penjualan yang dapat setiap saat dijadikan tempat studi banding, konfirmasi, dan kolaborasi program, sehingga dalam penelitian ini pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri dijadikan kunci pertama dalam penentuan kompetensi lulusan yang diharapkan.
- 1.7.2. Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di suatu sekolah yang dalam pola Manajemen berbasis sekolah (MBS), merupakan direktor, motivator dan fasilitator dalam implementasi CBT secara lancar dan optimal untuk program keahlian Penjualan.
- 1.7.3. Kepala Sekolah adalah Penentu Kebijakan di tingkat sekolah, di mana warna yang muncul di sekolah tersebut bergantung kepada komposisi yang diinginkan Kepala Sekolah itu sendiri.
- 1.7.4. Kepala Sekolah memegang peranan sentral dalam menghimpun, memanfaatkan dan menggerakkan secara optimal seluruh potensi dan sumber daya yang terbatas untuk membawa sekolah dan masyarakat sekolah yang dikelolanya.
- 1.7.5. Guru adalah merupakan sarana sumber dan *key informan* khususnya dalam bidang kompetensi yang harus dimiliki oleh Siswa Program Keahlian Penjualan sehingga paling tidak, guru harus memiliki syarat kecakapan minimal untuk dapat menjembatani antara kompetensi yang harus dimiliki para siswa dengan kompetensi yang diharapkan oleh Dunia Usaha atau Dunia industri.

- 1.7.6. Bagi guru Program Keahlian Penjualan syarat kecakapan minimal yang dimaksud adalah: (1) memiliki kemampuan menyiapkan bahan ajar (2) menyiapkan media dan alat peraga yang sesuai dengan kompetensi yang dimaksud (3) menyajikan materi, mendemonstrasikan kompetensi atau menyampaikan kriteria unjuk kerja bagi para siswa (4) melaksanakan uji kompetensi dan melakukan penilaian terhadap kompetensi yang telah dicapai para siswa Program keahlian penjualan.
- 1.7.7. Pada umumnya guru memiliki kesiapan kompetensi yang berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya yang sampai penelitian ini dilakukan belum pernah ada penelitian lain yang menyatakan tinggi rendahnya perbedaan kompetensi tersebut.
- 1.7.8. Fasilitas Pendidikan untuk program keahlian Penjualan dapat mempengaruhi Standar Kompetensi Kerja Nasional siswa karena sulit menciptakan proses pembelajaran yang bermakna kalau fasilitas pendidikan tidak cukup tersedia.
- 1.7.9. Apabila siswa lulusan SMK program Keahlian penjualan mempunyai kompetensi dalam bidangnya dan tapi tidak diakui kemampuannya oleh Dunia Usaha/Dunia Industri maka standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia harus disesuaikan dengan standar Dunia Usaha/Dunia Industri.

1.8. Premis Penelitian

Sebagai landasan berfikir dalam menganalisis permasalahan, maka premise penelitian dirumuskan dari konsep-konsep yang dikemukakan antara

adalah:

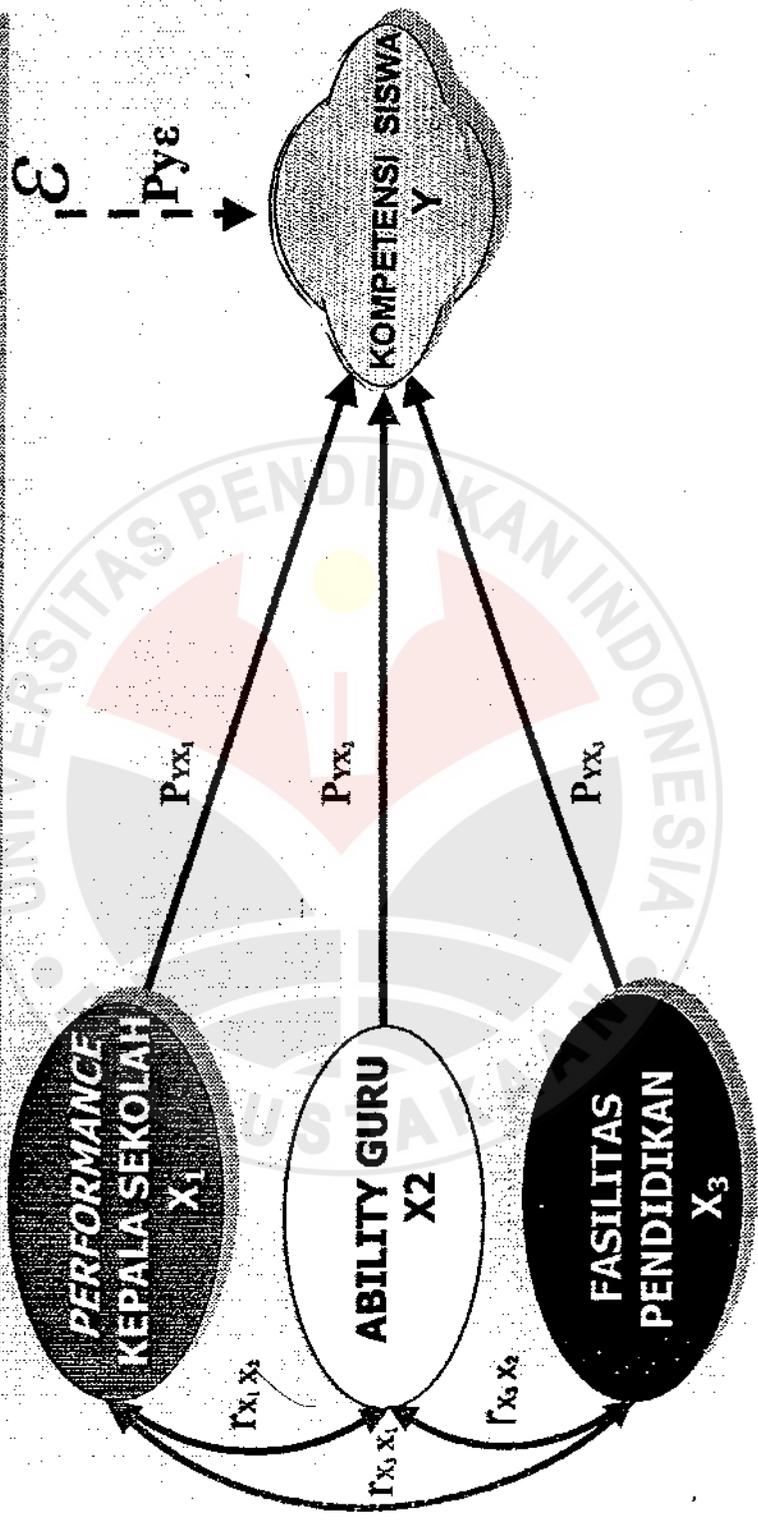
- 1.8.1. Keberadaan Kepala Sekolah dalam sistem persekolahan di Indonesia ditegaskan dalam pasal 12 PP No. 23/1990, tentang Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa: "Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana".
- 1.8.2. Bernadus Wongkar (1990) mengemukakan bahwa iklim kondusif dalam proses belajar mengajar perlu diciptakan, agar memungkinkan terselenggaranya interaksi yang dinamik dan dapat menunjang peningkatan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dengan kecenderungan perubahan.
- 1.8.3. Jackson (361-365), Fullan (1991:37) mengemukakan bahwa "Proses saling adaptasi (*mutual adaptation*) dalam penerapan pembaruan melahirkan perubahan konsep inovasi, perubahan konsep implementasi serta perubahan pandangan si pelaksana. Perubahan dilihat sebagai proses yang tumbuh dalam implementasi (*Change is seen as an implementation driven processes*)".

1.9. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diibaratkan dalam menembak atau panahan merupakan acuan atau titik bidik. Dalam sebuah peta perjalanan penelitian bidikan bisa tepat sasaran bisa juga menyimpang dari sasaran. Dalam hipotesis statistik jika dugaan terhadap sasaran adalah melesat atau dengan hipotesis nol dideskripsikan bahwa "tembakan tidak akan kena sasaran dengan kata lain tidak terdapat hubungan antara panah atau peluru dengan sasaran tembak" dapat dirumuskan dengan bentuk $H_0 : \rho = 0$ (symbol ρ (rho) menunjukkan kuatnya dugaan terhadap tepatnya sasaran atau kuatnya hubungan). Hipotesis nol biasanya berpasangan dengan hipotesis alternatif yang dideskripsikan bahwa "tembakan akan kena sasaran atau terdapat pola hubungan antara peluru/panah dengan sasaran tembak" diformulasikan dengan hipotesis alternatif $H_a : \rho \neq 0$ pengertian $\neq 0$ adalah tidak sama dengan nol berarti terdapat angka yang memiliki harga positif yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel penelitian seperti $H_a : \rho_{x_1x_2} \neq 0$; $H_a : \rho_{x_1x_3} \neq 0$; $H_a : \rho_{x_3x_2} \neq 0$.

Dalam penelitian ini hipotesis tersebut selain akan berbunyi adanya korelasi parsial (r) atau pola hubungan dengan kekuatan tertentu antar variabel independen, juga akan berbunyi hubungan jalur (*Path*) terdapat pengaruh beberapa variabel independen terhadap sebuah variabel dependen dengan bentuk rumus hipotesis $H_0 : \rho_{yxi} = 0$; $H_a : \rho_{yxi} \neq 0$. Pola hubungan variabel hipotesis tersebut divisualisasikan dalam gambar 1.2. berikut ini :

Gambar 1.3
STRUKTUR HUBUNGAN KAUSALITAS ANTAR VARIABEL



Hipotesis 1: *Performance* Kepala Sekolah dapat berpengaruh secara positif kepada kompetensi Siswa program keahlian Penjualan yang terstandarkan pada Standar Kompetensi Nasional.

Ho : $P_{yx1} = 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel X1 *Performance* Kepala Sekolah terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Ha : $P_{yx1} \neq 0$ (terdapat pengaruh positif antara variabel X1 *Performance* Kepala Sekolah terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Hipotesis 2 : Abilitas guru program keahlian Penjualan dapat berpengaruh secara positif terhadap pencapaian kompetensi Siswa Program Keahlian Penjualan yang terstandarkan oleh Standar Kompetensi Nasional.

Ho : $P_{yx2} = 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel X2 Abilitas Guru terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Ha : $P_{yx2} \neq 0$ (terdapat pengaruh positif antara variabel X2 Abilitas Guru terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Hipotesis 3 : Fasilitas pendidikan dapat berpengaruh secara positif terhadap kompetensi siswa Program Keahlian Penjualan yang terstandarisasi oleh Standar Kompetensi Nasional

Ho : $P_{yx3} = 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel X3 Fasilitas Pendidikan terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

$H_a : P_{yx3} \neq 0$ (terdapat pengaruh positif antara variabel X3 Fasilitas Pendidikan terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Hipotesis 4: Performance Kepala Sekolah dan abilitas guru secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kompetensi siswa program keahlian Penjualan yang terstandarisasikan oleh Standar Kompetensi Nasional .

$H_o : P_{yx1x2} = 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel X1 Performance Kepala Sekolah dan X2 abilitas guru secara bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

$H_a : P_{yx1x2} \neq 0$ (terdapat pengaruh positif antara variabel X1 Performance Kepala Sekolah dan X2 abilitas guru secara bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Hipotesis 5: Performance Kepala Sekolah dan fasilitas pendidikan secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kompetensi siswa Program keahlian Penjualan yang terstandarisasikan oleh Standar Kompetensi Nasional.

$H_o : P_{yx1x3} = 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel X1 Performance Kepala Sekolah dan X3 Fasilitas Pendidikan secara bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Ha : $P_{yx1x2} \neq 0$ (terdapat pengaruh positif antara variabel X1 Performance

Kepala Sekolah dan X3 Fasilitas Pendidikan secara bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Hipotesis 6 : Abilitas guru dan fasilitas pendidikan secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kompetensi siswa yang terstandarisasikan oleh Standar Kompetensi Nasional.

Ho : $P_{yx2x3} = 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel X2 abilitas guru dan

X3 Fasilitas Pendidikan secara bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Ha : $P_{yx2x3} \neq 0$ (terdapat pengaruh positif antara variabel X2 abilitas guru dan

X3 Fasilitas Pendidikan secara bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Hipotesis 7 : Performance Kepala Sekolah, abilitas guru, dan fasilitas pendidikan secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kompetensi siswa Program Keahlian Penjualan yang terstandarisasikan oleh Standar Kompetensi Nasional.

Ho : $P_{yx1x2x3} = 0$ (tidak ada pengaruh positif antara variabel X1 Performance

Kepala Sekolah, X2 abilitas guru dan X3 Fasilitas Pendidikan secara bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Ha : $P_{yx1x2x3} \neq 0$ (terdapat pengaruh positif antara variabel X1 Performance

Kepala Sekolah, X2 abilitas guru dan X3 Fasilitas Pendidikan secara

bersama-sama terhadap Variabel Y Kompetensi Siswa program keahlian penjualan)

Hipotesis 8 : Terdapat pola hubungan yang signifikan antara Performance Kepala Sekolah dengan abilitas guru Program Keahlian penjualan.

$$H_0 : \rho_{x_1x_2} = 0$$

$$H_a : \rho_{x_1x_2} \neq 0$$

Hipotesis 9 : Terdapat pola hubungan yang signifikan antara Performance Kepala Sekolah dengan Fasilitas Pendidikan pada Program Keahlian penjualan.

$$H_0 : \rho_{x_1x_3} = 0$$

$$H_a : \rho_{x_1x_3} \neq 0$$

Hipotesis 10 : Terdapat pola hubungan yang signifikan antara Ability guru dengan Fasilitas Pendidikan pada Program Keahlian penjualan.

$$H_0 : \rho_{x_2x_3} = 0$$

$$H_a : \rho_{x_2x_3} \neq 0$$

1.10. Metode Penelitian

Mengingat dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat pengaruh dari beberapa variabel independen (Kepala Sekolah, ability Guru, dan fasilitas pendidikan) terhadap variabel dependen (Kompetensi Siswa), maka pendekatan dalam permodelan serta teknik solusi yang akan dipergunakan sebagai model analisis di dalam disertasi ini adalah Metode *Path Analysis* (Analisis Jalur).



Gambar 1.3. memperlihatkan struktur hubungan kausalitas antar variabel. Dimana P_{yx1} , P_{yx2} , P_{yx3} masing masing menunjukkan jalur-jalur yang akan di analisis seberapa besar kekuatan pengaruh dalam jalur masing masing. Sedangkan r_{x1x2} , r_{x3x2} , dan r_{x3x1} akan dihitung berapa besar koefisien korelasi antar variabel tersebut secara partial. Variabel epsilon yang terlihat pada gambar 1.2. adalah factor pengaruh variabel yang lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian namun kemungkinan juga memiliki angka kekuatan tertentu walaupun hanya berupa residu dari kekuatan-kekuatan angka variabel yang diteliti.

Pemilihan metode Analisis Jalur bagi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa metode ini mampu memberikan kejelasan hubungan dan besaran antar variabel penelitian yang sangat berguna bagi upaya peneliti dalam mengupas secara lebih detail berbagai faktor yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap kompetensi siswa sebagai produk pendidikan.

Yang dimaksud produk pendidikan dalam penelitian ini adalah aktualisasi dari fungsi-fungsi manajemen sistem pendidikan di tingkat SMK. Kepala Sekolah selaku pucuk pimpinan harus menjadi ujung tombak yang keputusan dan kebijakannya akan menjadi pengendali dalam terlaksananya fungsi-fungsi manajemen pendidikan di SMK itu sendiri. Seluruh SDM yang ada akan menjadi faktor penting dan harus sinergi terhadap tercapainya misi dan visi SMK dalam upaya membentuk karakter manusia/peserta didik yang sarat akan kompetensi yang diminatinya.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi pendukung dan praktek yang terkait dengan produk yang akan dikembangkan yaitu implementasi pendekatan *Competency Based Training*

(CBT). Observasi ini dilakukan terhadap sejumlah SMK Negeri yang ada di Kota Bandung.

Langkah ini digunakan untuk menguji validitas dan Realibilitas perangkat Penelitian setelah itu dikembangkan. Diawali dari penyusunan angket untuk variabel-variabel yang akan diteliti yaitu; Kepala Sekolah, Guru, Fasilitas dan Kompetensi siswa.

Penelitian pendahuluan ini untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian dengan praktek pendidikan. Temuan-temuan dalam penelitian pendidikan ini (Penelitian dasar dan aplikatif) diujicobakan dan divalidasiikan melalui penelitian dan pengembangan agar melahirkan produk-produk yang teruji, dengan cara:

- a) Mengadakan observasi ke SMK untuk memperoleh kejelasan tentang relevansi kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI.
- b) Mengadakan wawancara dan mengumpulkan informasi serta data dokumentasi bnerkaitan dengan standar kompetensi program keahlian penjualan.
- c) Membagikan angket kepada para siswa tingkat III yang tercatat telah selesai melaksanakan praktek
- d) Mengumpulkan data berupa wawancara dengan guru tentang berbagai kendala serta harapan dalam implementasi CBT.
- e) Melakukan wawancara dengan para siswa mengenai proses pelatihan, penggunaan bahan pembelajaran sampai uji kompetensi.

Proses pelaksanaan penelitian pendahuluan termasuk pengujian validitas dan reliabilitas instrument diuraikan pada lampiran disertasi ini.